



# ISU-ISU STRATEGIS: REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PERAN ANALIS KEBIJAKAN

Erna Irawati

PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN  
DEPUTI BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI  
2018

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## POKOK BAHASAN

- REVOLUSI INDUSTRI 4.0**
- KONDISI KEBIJAKAN DI**
- INDONESIA**
- TANTANGAN KEBIJAKAN DI**
- ERA RI 4.0**

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## MEGATRENDS 2030 (George Vielmetter & Yvone Sell, 2014)

- Globalisasi (from West to East)
- Krisis lingkungan dan energi (memicu perang?)
- Perubahan Demografi (aging population)
- Digital Era (people always on)...internet of things (IoT)
- Technological Convergence (Nano, Bio, Robotic)
- Individualisme dan Pluralisme (higher income society)

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## REVOLUSI INDUSTRI



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI



Batasan antara lingkungan fisik, digital dan biologis menjadi kabur

# IMPLIKAS

# INDUSTRY 4.0

 INTEGRITAS
  PROFESIONAL
  INOVATIF
  PEDULI



 INTEGRITAS
  PROFESIONAL
  INOVATIF
  PEDULI

# PERUBAHAN ITU TELAH TERJADI

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br><b>UBER</b><br>World's largest taxi company<br>Owns NO Taxis   | <br><b>airbnb</b><br>World's largest Accommodation provider<br>Owns NO Real estate | <br>World's largest Phone companies<br>Owns NO Telco infra           | <br><b>Alibaba Group</b><br>World's most Valuable retailer<br>Owns NO Inventory |
| <br><b>facebook</b><br>Most popular Media owner<br>Owns NO Content | <br><b>SocietyOne</b><br>World's fastest Growing bank<br>Owns NO Actual money      | <br><b>NETFLIX</b><br>World's largest movie house<br>Owns NO Cinemas | <br>World's largest Software vendors<br>Owns NO Apps                            |

 INTEGRITAS
  PROFESIONAL
  INOVATIF
  PEDULI

## 10 STRATEGI PRIORITAS NASIONAL UNTUK MAKING INDONESIA 4.0

**Making Indonesia 4.0**, sebuah roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0 untuk mencapai 10 besar ekonomi terkuat dunia di tahun 2030.



1. Perbaiki Alur Aliran Material
2. Mendesain Ulang Zona Industri
3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Pemberdayaan UMKM
5. Menerapkan Insentif Investasi Teknologi
6. Pembentukan Ekosistem Inovasi
7. Menarik Investasi Asing
8. Harmonisasi Aturan dan Kebijakan
9. Membangun Infrastruktur Digital Nasional
10. Akomodasi Standar Sustainability

 INTEGRITAS
  PROFESIONAL
  INOVATIF
  PEDULI

# MAKING INDONESIA 4.0

Indonesia menetapkan 10 prioritas nasional untuk "Making Indonesia 4.0"

### 10 National Priorities

|  |  |
|--|--|
| <b>1 Perbaikan alur aliran material</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat produksi material sektor hulu, contoh 50% dari bahan baku petrokimia yang masih impor</li> </ul>                                 | <b>6 Menarik investasi asing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghargakan perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran yang menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi</li> </ul> |
| <b>2 Mendesain ulang zona industri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun peta jalan zona industri nasional (mis. industry belts), mengatasi permasalahan yang dihadapi di beberapa zona industri</li> </ul> | <b>7 Peningkatan kualitas SDM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desain kembali kurikulum Pendidikan menyesuaikan era Industry 4.0</li> <li>Program talent mobility untuk profesional</li> </ul>               |
| <b>3 Akomodasi standar sustainability</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesempatan daya saing melalui tren sustainability global, mis. EV, biofuel, energi terbarukan</li> </ul>                                  | <b>8 Pembentukan ekosistem inovasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sentra R&amp;D&amp;I oleh Pemerintah, swasta, publik, maupun universitas</li> </ul>   |
| <b>4 Pemberdayaan UMKM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberdayakan 3,7 juta UMKM<sup>1</sup> melalui teknologi, misalnya e-commerce UMKM, pendanaan teknologi</li> </ul>                                      | <b>9 Menerapkan insentif investasi teknologi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan tax exemption/subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan</li> </ul>                                  |
| <b>5 Membangun infrastruktur digital nasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan sagan dan reform digital: menjadi 5G, optik 1G, center data</li> </ul>  | <b>10 Harmonisasi aturan dan kebijakan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian</li> </ul>  |

1. Termasuk Usaha Mikro dan Kecil  
2. Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

INTEGRITAS 
 PROFESIONAL 
 INOVATIF 
 PEDULI



INTEGRITAS 
 PROFESIONAL 
 INOVATIF 
 PEDULI

# REVOLUSI INDUSTRI 4.0



Dalam mengimplementasikan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, Pemerintah memprioritaskan beberapa kebijakan:



Nilai ini akan berdampak terhadap Perekonomian Nasional



- INTEGRITAS
- PROFESIONAL
- INOVATIF
- PEDULI

## POTENSI EKONOMI DIGITAL INDONESIA

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2020. Salah satunya melalui penerbitan roadmap e-commerce.

### FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

Proyeksi transaksi di Indonesia 2018: **US\$ 14,5 miliar** (Rp 190 triliun)  
 Nominal transaksi per proporsi 2014: **US\$ 56,98** (Rp 747 triliun)

Pemain utama:

### ON DEMAND SERVICES

Pangsa pasar Indonesia tinggi: **132,7 juta** Pengguna internet / Pengguna ponsel pintar

Pangsa pasar:

### E-COMMERCE

Potensi transaksi di Indonesia:

| Tahun | 2013        | 2018        | 2020          |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| US\$  | 8 miliar    | 20 miliar   | 130 miliar    |
| Rp    | 104 triliun | 261 triliun | 1.700 triliun |

Pemain utama:

### INTERNET OF THINGS (IOT)

Potensi pasar Asia Pasifik:

| Tahun | 2013       | 2020       |
|-------|------------|------------|
| US\$  | 250 miliar | 583 miliar |

Pemain utama:

©2018 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, REPUBLIK INDONESIA. BERSAMA SAMA MELAKUKAN TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA
www.katadata.id

- INTEGRITAS
- PROFESIONAL
- INOVATIF
- PEDULI



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## PERKEMBANGAN PENGGUNAAN INTERNET



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

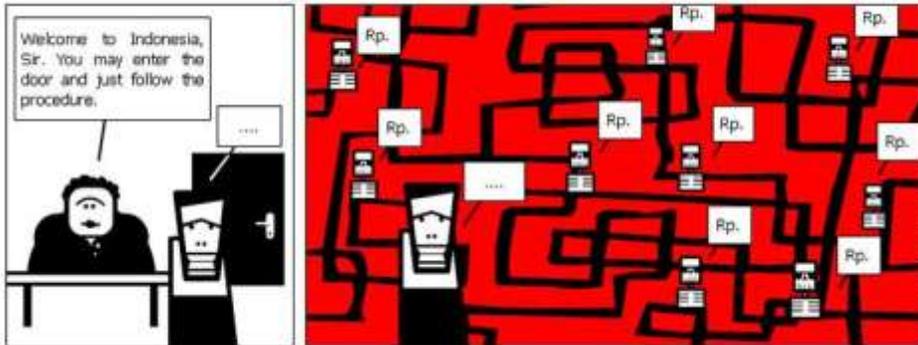


# Birokrasi Indonesia

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## BERBELIT-BELIT?

### Indonesia bureaucracy



Ilustrasi Birokrasi di Indonesia(theeya-tia.blogspot.com)

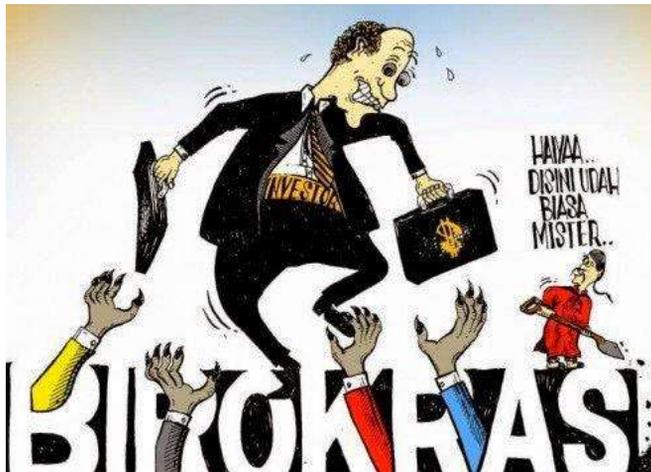
INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

# MASALAH ETIKA DAN INTEGRITAS



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## KORUPSI DAN PUNGLI



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## PELAYANAN PUBLIK

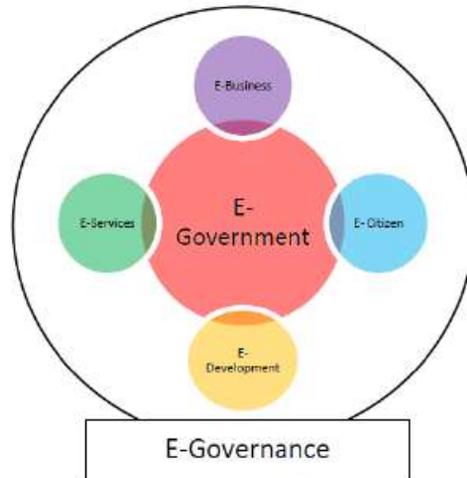


INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI



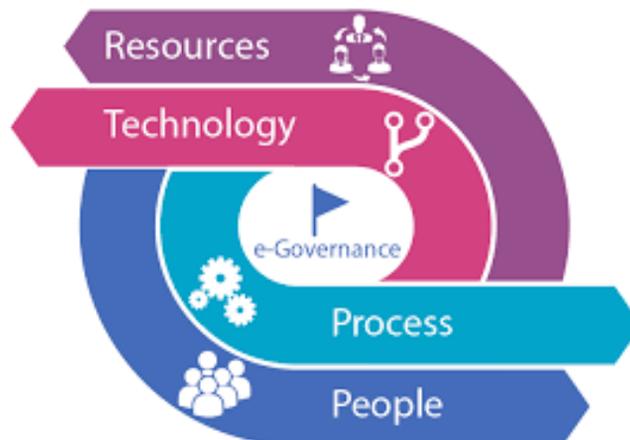
INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## KONSEPSI E-GOVERNMENT



 INTEGRITAS
  PROFESIONAL
  INOVATIF
  PEDULI

## KOMPONEN E-GOVERNMENT



 INTEGRITAS
  PROFESIONAL
  INOVATIF
  PEDULI

## Tantangan Implementasi e-Government di Indonesia



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## Tugas analisis kebijakan

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI



**Butir Kegiatan dalam PermenPAN dan RB 45 tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya**

- Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan ;
- Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan;
- Menyusun naskah akademis;
- Menyediakan rekomendasi kebijakan;
- Melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah atau rekomendasi kebijakan;
- Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;
- Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan ;
- Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan dan rekomendasi kebijakan;
- Melakukan advokasi kebijakan;
- Melakukan diseminasi kebijakan;
- Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;
- Membuat tulisan dalam bentuk monograf, artikel, jurnal dan dipublikasikan.

# HASIL KERJA ANALIS KEBIJAKAN



## Analisis Kebijakan adalah...

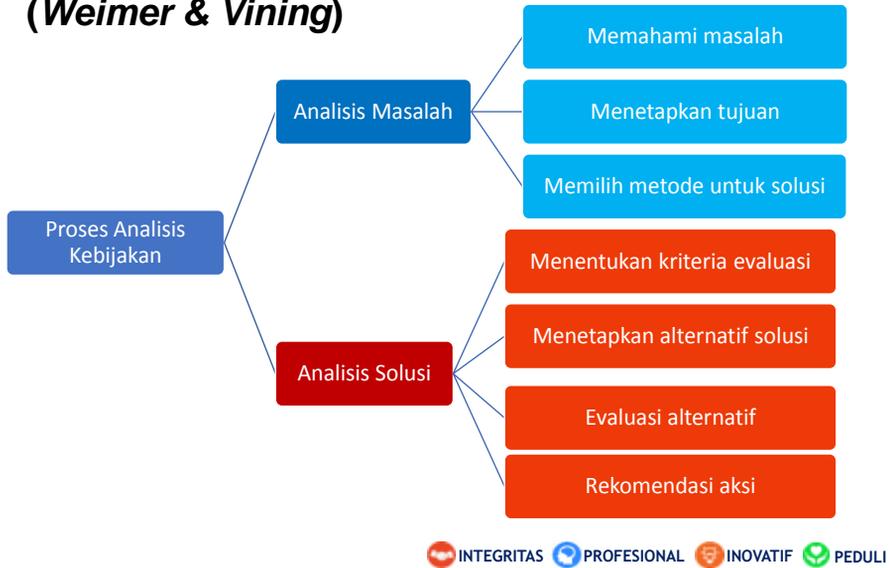
### • William N Dunn

- "... suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam **metodologi** penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan"

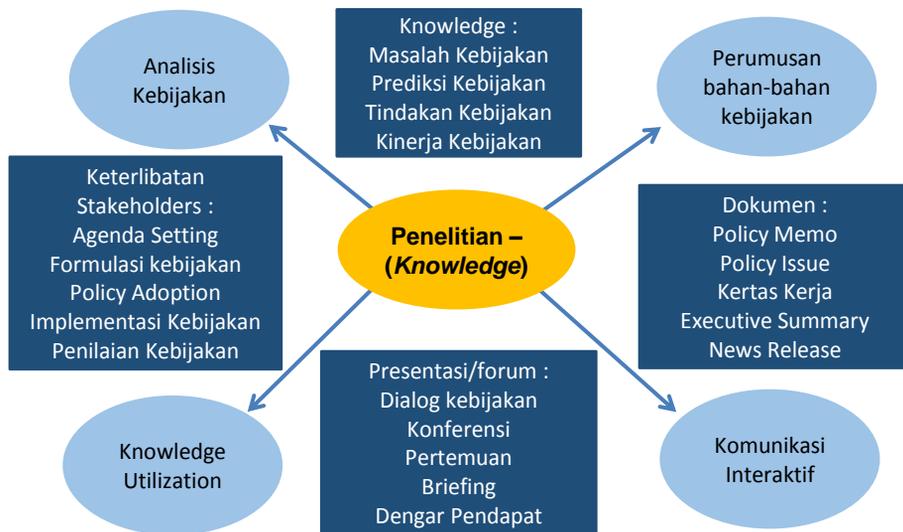
### Walter William (1971)

- Sebuah cara **pensintesaan informasi** termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan suatu format keputusan kebijakan dan menentukan informasi yang relevan dengan kebijakan.

## Proses Analisis Kebijakan (Weimer & Vining)



## Mengelola Hasil Penelitian untuk Kebijakan





Menggunakan metode analisis kebijakan untuk memberikan informasi lebih lanjut dan lebih baik dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan



Menerjemahkan informasi dan analisis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain



Menyiapkan dokumen saran kebijakan tertulis seperti, *policy paper*, *policy brief*, *policy memo* tentang solusi potensial untuk suatu masalah

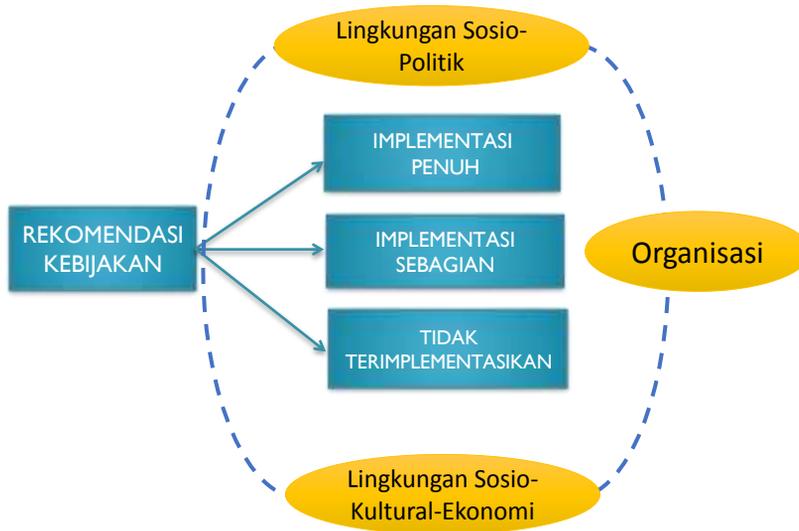


Mengkomunikasikan isi dokumen saran kebijakan baik melalui briefing, rapat, percakapan, dan konferensi kepada para pembuat kebijakan

## Bagaimana Analisis Kebijakan Dapat Meningkatkan Proses Pembuatan Kebijakan

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## Analisis Rekomendasi Kebijakan (Tiga Kemungkinan Implementasi Rekomendasi Kebijakan)



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada **tataran perdebatan kebijakan**.  
(LAN, 2015, Modul Pelatihan AK).

Dokumen singkat yang menyajikan **temuan dan rekomendasi dari sebuah penelitian** untuk *non-specialized audience*.  
(IDRC, Canada)

## Policy Brief

 INTEGRITAS  PROFESIONAL  INOVATIF  PEDULI

## Policy Paper dan Policy Brief

### Policy Brief

- 1 Policy brief menawarkan pertimbangan-pertimbangan atas berbagai opsi kebijakan kepada pembaca tertentu (particular audience) misalnya praktisi (pejabat/pimpinan organisasi pemerintahan, birokrasi), politisi, donors.
- 2 Policy Brief lebih bersifat “professional” karena ditargetkan untuk pembaca yang memiliki waktu terbatas untuk mengambil keputusan-keputusan.
- 3 Pertanyaan dalam bentuk ‘What’, ‘How’, ‘Who’, ‘When’.

### Policy Paper

- 1 Policy paper lebih bersifat “academic” karena memberikan perhatian yang lebih pada tinjauan akademis terhadap argumentasi tertentu dan juga penilaian-penilaian subyek tertentu berdasar pertimbangan intelektual dan kriteria intelektual.
- 2 Pembaca lebih luas tidak hanya praktisi tapi juga akademisi dan pihak lain yang tertarik dengan studi kebijakan.
- 3 Pertanyaan ‘why’.

 INTEGRITAS  PROFESIONAL  INOVATIF  PEDULI

## Jenis dan Perbedaan Komponen Makalah Kebijakan

| Komponen                  | Penelitian Kebijakan (Policy Study)                            | Makalah Kebijakan Ringkas (Policy Brief)                  | Memo Kebijakan (Policy Memo)                             |
|---------------------------|--|---|--|
| Audien / Kelompok Sasaran | Spesialis kebijakan  | Pembuat keputusan   | Beragam stakeholder                                      |
| Fokus                     | Value-driven: Rekomendasi umum dan analisis isu-isu kebijakan  | Audience-driven: Pesan kebijakan khusus untuk stakeholder | Audience-driven: Pesan kebijakan untuk stakeholder kunci |
| Konteks Isu               | Diseminasi dan debat mengenai hasil-hasil penelitian kebijakan | Digunakan untuk tujuan advokasi dan lobi                  | Digunakan untuk tujuan advokasi dan lobi                 |
| Metodologi                | Dapat memuat penelitian primer                                 | Jarang memuat penelitian primer                           | Jarang memuat penelitian primer                          |
| Bahasa                    | Sangat akademis / teknis                                       | Harus jelas   | Harus jelas  |
| Panjang                   | Maksimum 60 halaman  | Antara 2 – 4 halaman                                      | Maksimal 2 halaman                                       |

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## Policy Brief

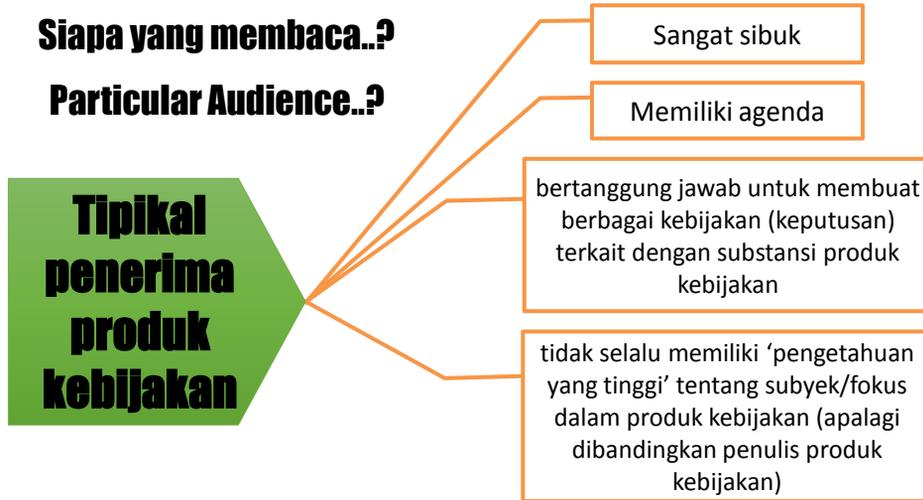
Bertujuan untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasar informasi yang relevan (*informed evidence-based*) pada organisasi-organisasi yang relevan (memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/membuat keputusan).

Menjelaskan issue/masalah, konteks, stakeholders, cakupan dan dampak. Policy brief mengeksplorasi berbagai penyebab masalah, hubungan antar berbagai isu terkait, serta mengidentifikasi implikasi temuan-temuan dalam analisis terhadap aktor-aktor kunci.

Meski temuan dibangun dalam konteks akademik yang kuat (metodologi ilmiah), target pembaca dari policy brief adalah profesional, yang memiliki waktu yang terbatas untuk mempertimbangkan berbagai hal (materi/latar belakang) sebelum mengambil keputusan.

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

# Komunikasi Policy Brief



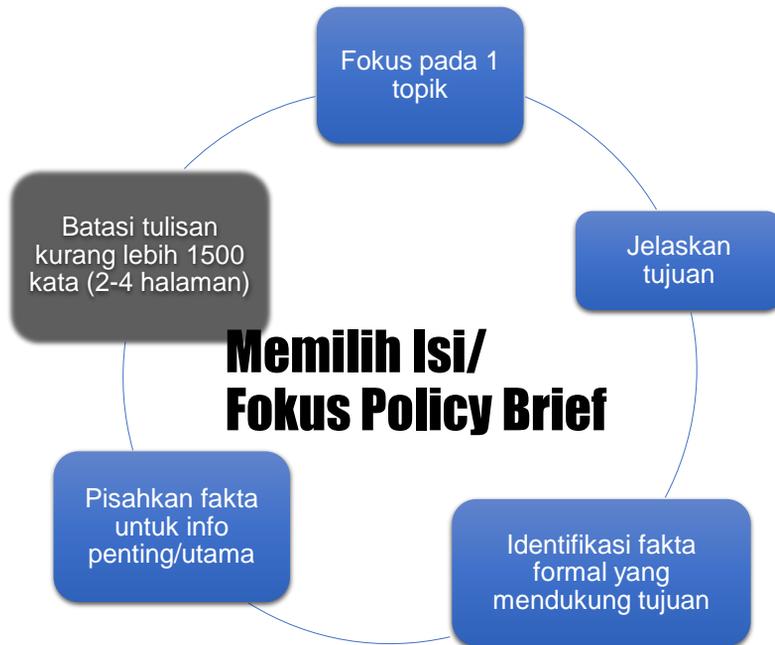
INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## Siapa Pembaca Policy Brief..?

- 1 Kepada siapa Policy Brief ditujukan?
- 2 Bagaimana tingkat pengetahuan/pemahaman mereka dengan isu atau fokus Policy Brief?
- 3 Bagaimana sikap dan tanggapan mereka dengan isu atau fokus Policy Brief?
- 4 Bagaimana Policy Brief dapat memenuhi kebutuhan mereka?
- 5 Bagaimana mempengaruhi atau mempersuasi mereka?



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## TEMPLATE POLICY BRIEF

1. Judul.
2. Executive Summary
3. Pendahuluan
4. Pendekatan dan Hasil
5. Kesimpulan
6. Implikasi dan Rekomendasi
7. Apendiks atau lampiran (bila harus ada)
8. Daftar Pustaka

**Format 1**

1. Judul
2. Ringkasan (Eksektif)
3. Pendahuluan
4. Deskripsi masalah
5. Rekomendasi kebijakan
6. Kesimpulan
7. Apendiks atau lampiran (bila harus ada)
8. Daftar Pustaka

**Format 2**

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI



● INTEGRITAS 
 ● PROFESIONAL 
 ● INOVATIF 
 ● PEDULI

## Cara Merumuskan JUDUL



● INTEGRITAS 
 ● PROFESIONAL 
 ● INOVATIF 
 ● PEDULI

# Cara Menyusun Executive Summary



 INTEGRITAS 
  PROFESIONAL 
  INOVATIF 
  PEDULI

## Contoh

Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah **pekerja migran** yang tinggi mencapai 9 juta pekerja atau **setara dengan 7 persen dari total angkatan kerja** Indonesia pada tahun 2016 dan penyumbang besar devisa negara. Meskipun mereka bekerja di luar negeri (negara-negara ASEAN, Asia Pasifik (Taiwan dan Hongkong) serta negara-negara Timur Tengah), **persoalan pekerja migran hampir 70 persen terkait dengan permasalahan yang terjadi atau berada di dalam negeri**. Mulai dari sumber informasi yang kurang valid, tidak transparansinya biaya penempatan, pendidikan untuk pekerja migran yang tidak memadai, serta merebaknya calo-calo perekrut para pekerja migran yang semakin hari semakin tumbuh subur saja akibat dari lemahnya regulasi pemerintah. Kondisi ini memberikan dampak terhadap **semakin tingginya penganiayaan** ..... jaminan keamanan dan kualitas tenaga migran. Berbagai permasalahan pekerja migran di atas sangat perlu dicarikan solusinya. **Pemerintah (?)** harus tegas untuk **merevitalisasi peraturan** yang ada untuk melindungi pekerja migran Indonesia...

 INTEGRITAS 
  PROFESIONAL 
  INOVATIF 
  PEDULI

## PENDAHULUAN



### Contoh:

- Peran apa yang dapat dimainkan Pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran? Bagaimana gambaran kebijakan ketenagakerjaan di negara penempatan?
- Penyebab sebagian besar pekerja migran bermasalah?
- Bagaimana Pemerintah merespon pelaksanaan hukuman mati bagi pekerja migran?
- Efektifkah moratorium pengiriman pekerja migran diberlakukan?
- Bagaimana penegakkan hukum terhadap pekerja migran di dalam negeri?

 INTEGRITAS
  PROFESIONAL
  INOVATIF
  PEDULI

## DESKRIPSI MASALAH



 INTEGRITAS
  PROFESIONAL
  INOVATIF
  PEDULI

## REKOMENDASI



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

## POLICY BRIEF dan ALTERNATIF KEBIJAKAN



INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan di sini dalam arti luas bukan hanya peraturan perundang-undangan tapi berbagai tindakan terkait isu/masalah.

Bagian ini menyajikan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh *target audience*.

- 1 Berikan opsi kebijakan/tindakan (paling tidak 3 opsi tindakan/maksimal 5).
- 2 Analisis opsi-opsi tersebut (kerugian dan keuntungan).
- 3 Sebutkan metode analisis yang digunakan (metode dan kriteria).
- 4 Sebutkan opsi yang direkomendasikan dan *outcomes*-nya.
- 5 Tuliskan hasil analisis dari sudut pandang yang kita wakili (*target audience*).
- 6 Untuk klarifikasi penulis bisa menampilkan pro dan kontra tiap opsi dalam bentuk yang menarik (*bullet points*, tabel, dan lain-lain) untuk mempermudah pembaca.
- 7 Analisis ini tidak membandingkan jumlah keuntungan dan kerugian (satu opsi dengan 1 keuntungan besar, mungkin memiliki beberapa kerugian yang kecil; dibandingkan dengan 2 keuntungan kecil dan 1 kerugian).
- 8 Analisis kita sangat menentukan saran kita pada *decision maker* untuk memilih opsi yang paling 'tepat' untuk dipilih.

 INTEGRITAS  PROFESIONAL  INOVATIF  PEDULI

## KESIMPULAN

- Ungkapkan poin penting dalam rekomendasi
- Solusi Konkrit

Moratorium bukanlah solusi yang terbaik karena banyak celah yang justru muncul dari moratorium pengiriman pekerja migran. Pemerintah harus mengambil alih sektor pendidikan untuk pekerja migran. Salah satunya dengan mengaktifkan dan mengoptimalkan Balai-balai latihan di daerah. Pendidikan harus diupayakan dengan cara yang profesional. Regulasi ataupun aturan perundangan yang ada harus diratifikasi, sehingga perlindungan terhadap buruh menjadi hal yang utama dan mendesak. Pemerintah perlu menyusun solusi kebijakan yang komprehensif meliputi berbagai sektor. Dengan cara ini, Indonesia dapat memiliki posisi tawar terhadap negara lain untuk saling membuat kesepakatan melindungi nasib para pekerja migran.

- Rencana Aksi (Langkah Kedepan)

 INTEGRITAS  PROFESIONAL  INOVATIF  PEDULI



## Terima kasih

Komunitas Analisis Kebijakan



@AnalisisKebijakan



Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan



[www.dkk.lan.go.id](http://www.dkk.lan.go.id)

[www.pusaka.lan.go.id](http://www.pusaka.lan.go.id)



[pusaka@lan.go.id](mailto:pusaka@lan.go.id)

[analisiskebijakan@gmail.com](mailto:analisiskebijakan@gmail.com)



(021) 3868201-05, 3455021-5

Fax: (021) 3800187



Jl. Veteran No.10, Jakarta, 10110



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI